



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT  
PERTEMUAN WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA  
DENGAN  
KONSTITUEN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

---

Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Pertemuan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021  
Waktu : 15.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Diamante Grand Ballroom Hotel Excelton Jln. Demang Lebar Daun Kecamatan IB I Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Acara : Gus Muhaimin Mendengar Konstituen Provinsi Sumatera Selatan  
Ketua : Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra  
Sekretaris Rapat : Susantomo S.I.P M.AP.  
Hadir : **1. Pimpinan**  
- Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI  
**2. Narasumber**  
- Farhan Alfikri  
- Hardono Ciputra  
**3. Peserta Offline**  
- Sultan Iskandar Mahmud Badarudin  
- Vebri Al Lintani  
- KH. M. Syarif Chumas  
- Bagindo Togar  
  
**4. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Watua DPR RI/Korkesra**  
**5. Staff**

## I. PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
3. Bahwa Anggota Dewan adalah pejabat *elected* sebagai pemegang amanah suara rakyat, wajib melakukan agregasi dan artikulasi terhadap kehendak dan aspirasi rakyat.
4. Bahwa Anggota DPR RI wajib memperjuangkan program pembangunan untuk daerah pemilihan.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI dengan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara Hybrid (Virtual dan offline) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Sumatera Selatan terutama yang terkait Isu sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang disampaikan saat melakukan dialog dengan tokoh akademisi, adat, agama serta masyarakat.

### ***Tanggapan Masyarakat***

Salah satu tokoh masyarakat Sumsel yang juga Ketua Asosiasi Raja-Sultan, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin menyampaikan aspirasinya dalam acara tersebut. Ia meminta Gus Muhaimin agar terus memperjuangkan RUU Masyarakat Adat. "Eksistensi Desa/Dusun serta masyarakat adat harus diakui dan diberikan keberlangsungan kehidupan oleh negara sesuai konstitusi.

Budayawan Sumsel, Vebri al Lintani menyampaikan pembangunan ekonomi dan sosial-budaya harus beriringan. Menurutnya, di Sumsel kekuatan budaya termasuk kerajaan budaya menjadi akar utama pembangunan di masyarakat. Mestinya seiring berjalan pembangunan ekonomi dan sosial-budaya. Khususnya di Sumsel kekuatan budaya (Kerajaan) menjadi akar utama pembangunan bagi masyarakat.

Tokoh agama yang juga Ketua RMI NU Sumsel, KH. M. Syarif Chumas Asyawali yang menyampaikan bahwa Perda Pesantren perlu dukungan penuh dari pemerintah pusat. Di Sumsel, katanya, lebih dari 400 pesantren yang butuh sentuhan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia. Perlu dorongan Perda Pesantren untuk Sumsel dari pemerintah pusat, agar ada efek positif bagi Pesantren di Sumsel.

Pengamat politik Bagindo Togar, "Aktivitas dan strategi Politik Kesejahteraan Gus Muhaimin dengan Roadshow Politik Kesejahteraan cukup bagus, serap langsung apa yang menjadi keluhan kesah masyarakat, meski digelar secara daring.

#### **Tanggapan A. Muhaimin Iskandar**

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra mengapresiasi masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah menjaga persatuan dan kesatuan. Menurutnya, Sumsel dibangun dengan budaya kebhinekaan yang sangat kokoh. Provinsi Sumatera Selatan memang dahsyat dalam menjaga persatuan dan kesatuan, dimana kebhinekaan sangat nyata, dari berbagai suku, agama dan golongan yang bermacam-macam tapi memang sangat kokoh.

Dalam acara yang dikemas dengan tema 'Gus Muhaimin Mendengar' itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra setuju dengan gagasan yang menyatakan budaya sebagai lokomotif yang tidak terpisahkan dengan pembangunan ekonomi, sosial dan pembangunan lainnya.

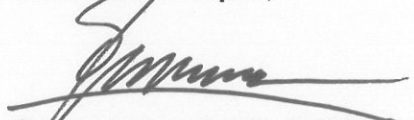
Menanggapi soal pesantren, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra menyampaikan, Pemerintah Pusat atau Presiden Jokowi telah memberikan perhatian kepada Pondok Pesantren. Ia telah menandatangani UU Pesantren tersebut. Tinggal daerah untuk menindaklanjutinya.

"Pak Jokowi sudah memulai soal pesantren, yang lain tinggal menindaklanjuti. Kita apresiasi Presiden Jokowi yang telah berkomitmen dalam mendukung pesantren. Kita akan dorong terus. Saat pandemi ini, pesantren masih konsisten dan bertahan. Pesantren tetap melakukan tatap muka dan berlangsung normal.

### **III. PENUTUP**

Pertemuan ditutup Pukul 16.15 WIB

**A.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,**



**Susantomo, S.I.P. M.AP.**